

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2023

Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat

www.dispora.jabarprov.go.id



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

dengan misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat pada misi 2 (dua) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan



yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dispora selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
2. Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus
3. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023 merupakan tahun yang cukup berat untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, dikarenakan keadaan penganggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya pulih. Dari 3 Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Sasaran pada tahun 2023 dengan realisasi dan capaian sebagai berikut :

1. Sasaran pertama Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dengan Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat dengan Target adalah 46,67 Point, dengan capaian sebesar 36,67 atau capaian 78,57%.
2. Sasaran Kedua Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus dengan Indikator Sasaran Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) Target 58%, dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 61%, dengan pencapaian Tahun 2023 dengan capaian 105,17%, dengan Perlambatan capaian sebesar 3,26 dari capaian tahun 2022. Indikator selanjutnya peringkat Jawa Barat pada multievent berkebutuhan khusus nasional PEPARPENAS dengan target tahun 2023 peringkat ke 3 dan realisasi sebesar peringkat 2 atau capaian sebesar 103,23%
3. Sasaran Ketiga Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional dengan target peringkat 1 (satu) pada event POPNAS 2023, dengan indikator



Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional, Target Peringkat 1 dengan realisasi peringkat 2 dan capaian 97,06%

Berdasarkan uraian pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, terdapat permasalahan dan kendala yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Indikator Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda yang belum bisa diukur pencapaiannya terkait rilis data yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas pada bulan Oktober 2023 sehingga pada penyusunan LKIP tahun 2023 menggunakan data tahun 2022.
2. Permasalahan kegagalan POPNAS tidak menjadi juara umum atau peringkat I adalah :
 - Kurangnya Persiapan Fisik yang Optimal, Beberapa atlet mungkin tidak mencapai kondisi fisik puncak karena kurangnya waktu latihan yang intensif dan terfokus sebelum bertanding
 - Infrastruktur Olahraga yang Kurang Memadai, Kurangnya fasilitas dan infrastruktur olahraga yang berkualitas dapat menghambat persiapan dan performa atlet.
 - Kekurangan Pembinaan Mental dan Strategi, Beberapa atlet mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola tekanan mental dan menerapkan strategi kompetitif yang efektif.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini berpedoman pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen resmi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan merujuk kepada indikator kinerja dengan orientasinya adalah output, outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan setiap tahun.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para Pejabat dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan rekan/teman sejawat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam penyusunan LKIP tahun 2023.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 19 Maret 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19690 6121988031002



DAFTAR ISI

	IKTISAR EKSEKUTIF	i
	KATA PENGANTAR	iv
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum	2
	1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
	1.5 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dispora Jabar	6
	1.6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	7
	1.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023	10
	1.8 Sistematika	12
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
	2.1 Perencanaan	13
	2.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
	3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2023)	20
	3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV	PENUTUP	39
	Lampiran	42



DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2018 – 2023	15
Tabel. 2.2	Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023	17
Tabel. 2.3	Program dan Anggaran Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023	18
Tabel. 3.1	Skala Penilaian	20
Tabel. 3.2	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	33
Tabel. 3.3	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	5
Gambar 1.1	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	6
Gambar 3.1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda di Jawa Barat	21
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	26
Gambar 3.3	Peringkat Jawa Barat pada Multieven Berkebutuhan khusus Nasional PEPARPENAS	28
Gambar 3.4	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional (POPNAS)	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Sebagai wujud pertanggungjawaban administratif dan dalam rangka untuk menjamin kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dispora Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Dispora Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan amanah dan perintah peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat perlu memaparkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 di Dispora Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP Dispora Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian



indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

- 1 Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2 Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
- 3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
- 4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
- 5 Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Dispora Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mengacu kepada :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

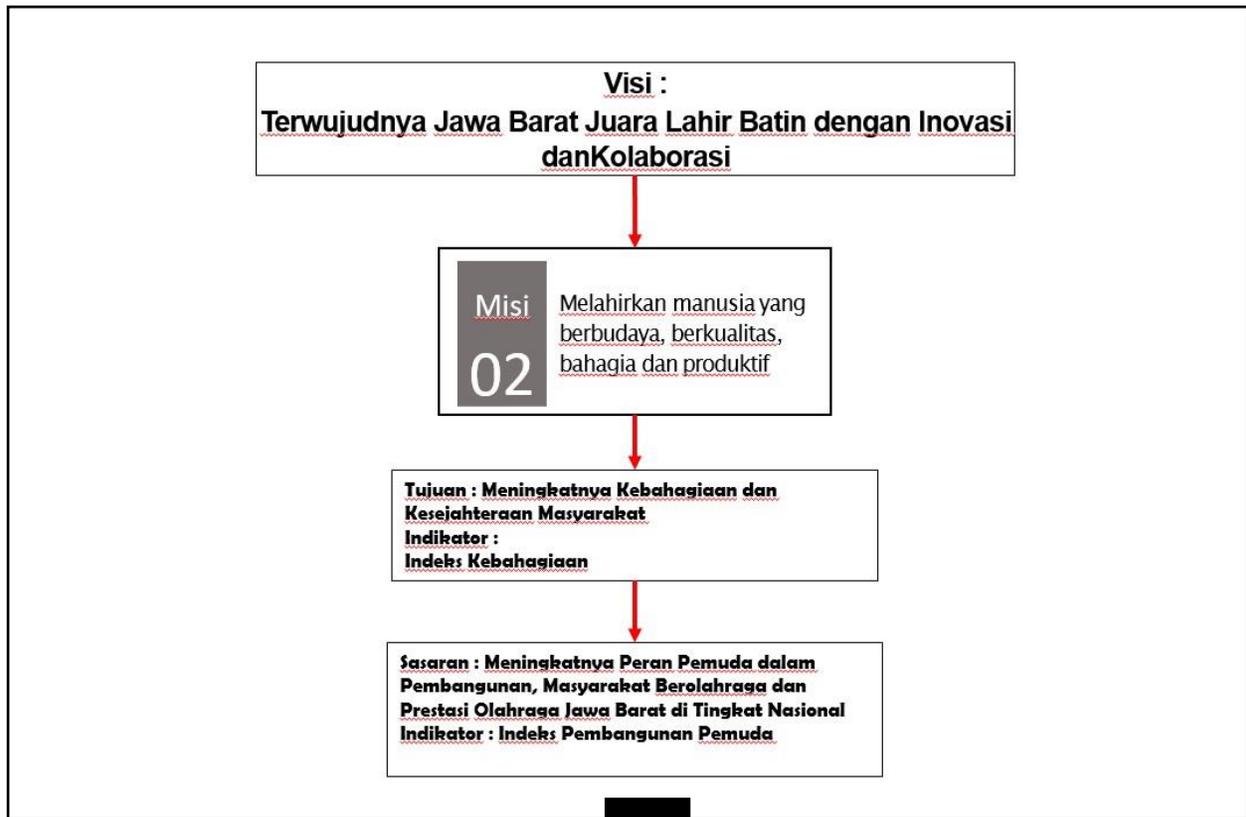
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

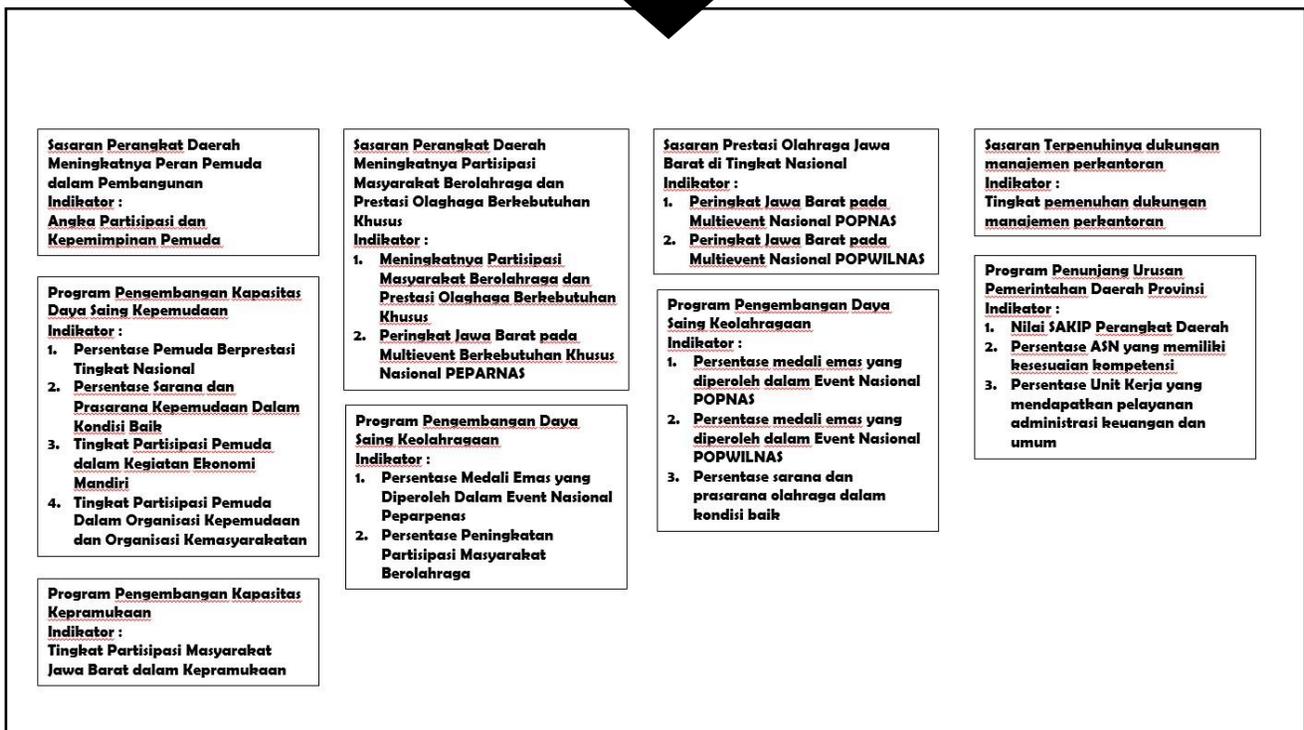


Gambar 1.1
Cascading Kinerja

RPJMD



RENSTRA

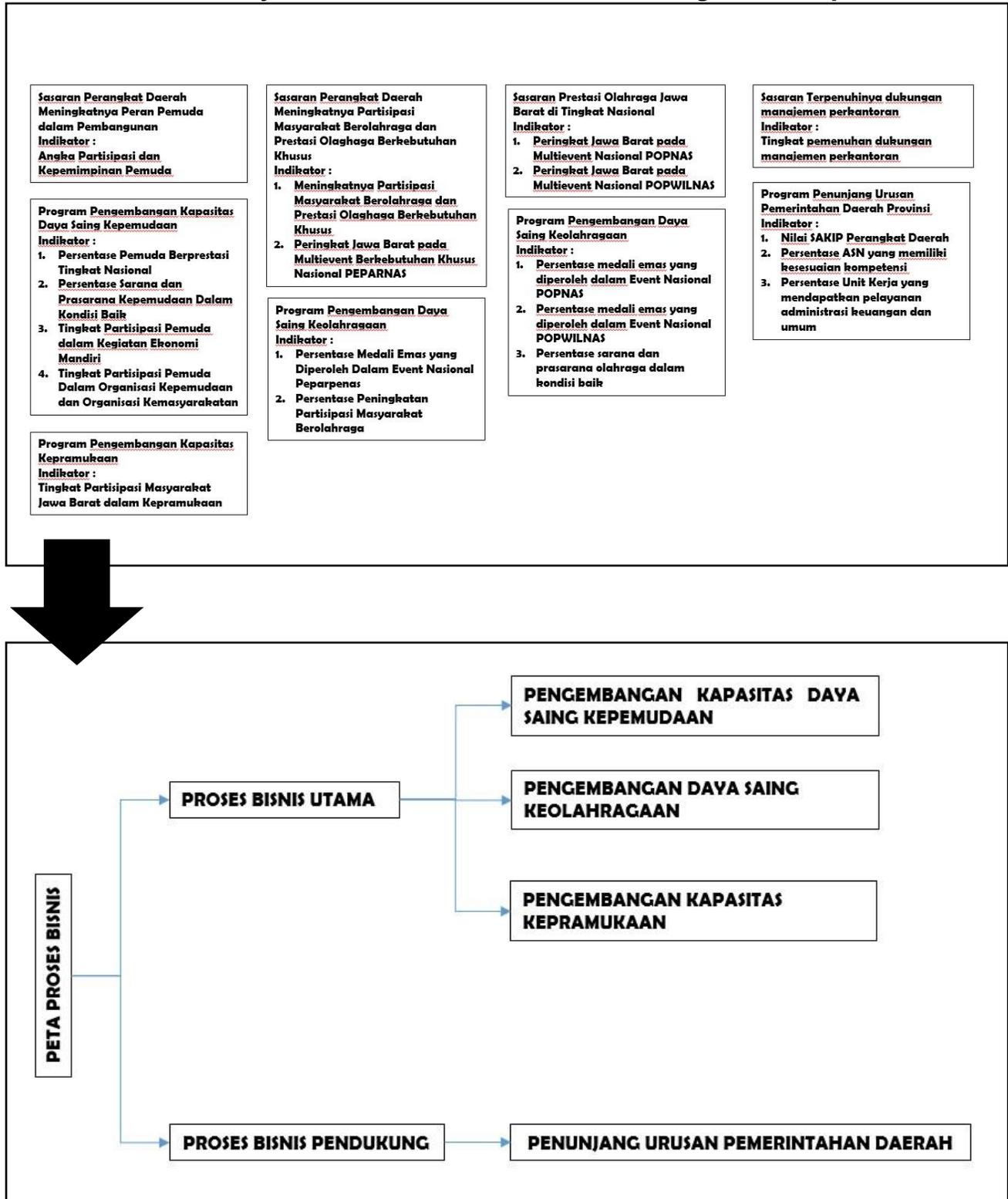


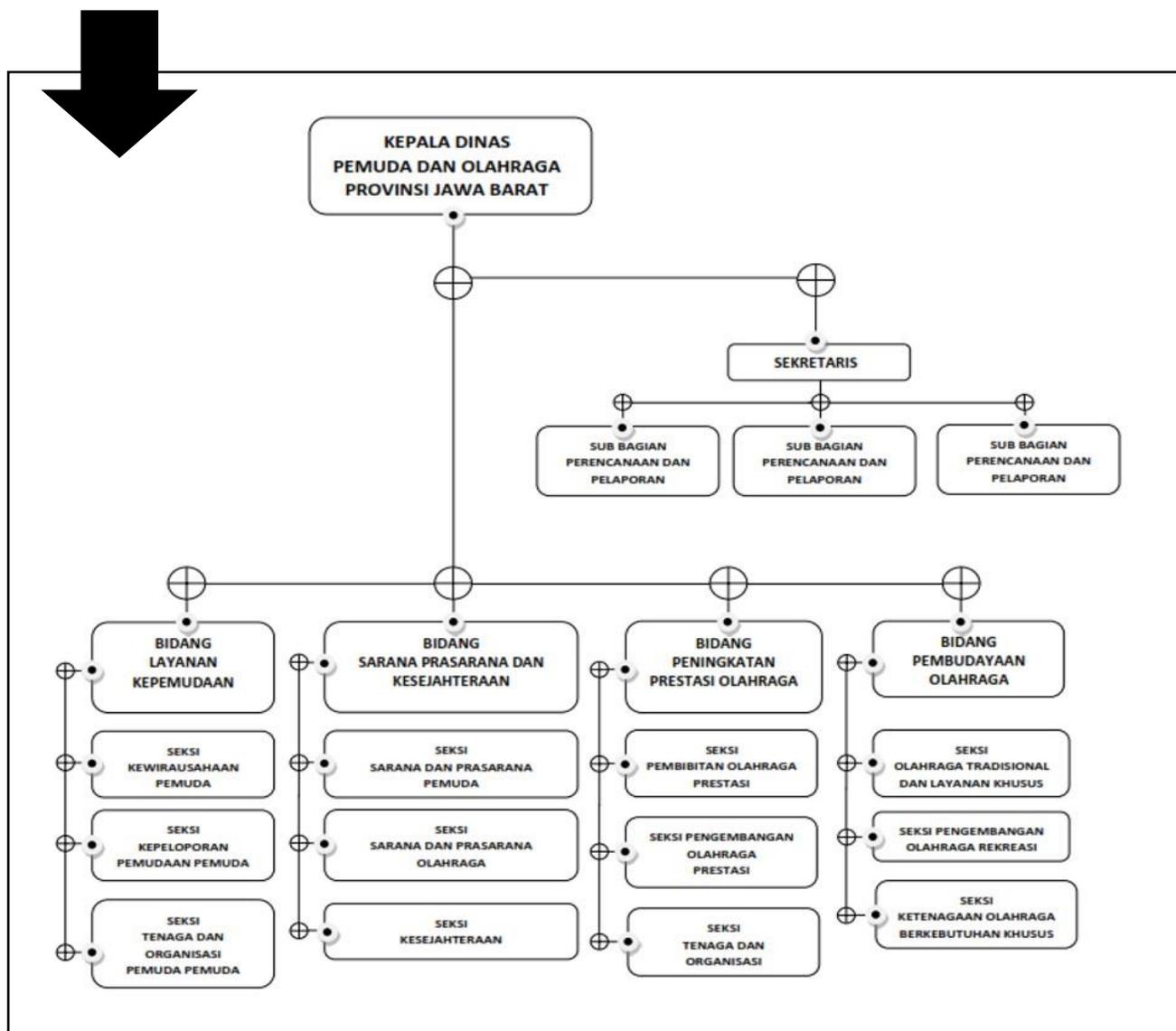
1.5 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dispora Jabar

Hubungan antara mandate kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dispora Jabar sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2

Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dispora





1.6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

FUNGSI

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PETA JABATAN

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dispora dibagi habis ke dalam jabatan struktural berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 865/KPG.04.01/MUTASI/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, dengan komposisi sebagai berikut :

Jabatan Struktural dan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	1	Dibawah Kasub Bag. Kepegawaian Umum dan Kehumasan
2	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	1	Pengelola Data
1	Kasub Bag. Kepegawaian Umum dan Kehumasan	2	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2	Kasub. Bag Perencanaan dan pelaporan	3	Pengelola Data
3	Kasubag Keuangan dan Aset	2	Dibawah Kasubag Keuangan dan Aset
3	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	1	Bendahara
1	Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda	2	Penyusun Laporan Keuangan
2	Kepala Seksi Tenaga Dan Organisasi Pemuda	3	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolng Sistem Keuangan
3	Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda	4	Verifikator Keuangan
4	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan	5	Pengelola Keuangan
1	Kepala Seksi Kesejahteraan	6	Pengadministrasi Keuangan
2	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda	3	Dibawah Kasub Bag. Kepegawaian Umum dan Kehumasan
3	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga	1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
1	Kepala Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi	3	Pengolah Informasi dan Komunikasi



Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> 2 Kepala Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi 3 Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi 6 Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 1 Kepala Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi 2 Kepala Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 3 Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Pengadministrasi Umum 4 Dibawah Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda 1 Analis Kepemudaan 2 Pengadministrasi Umum 3 Pengolah Data 5 Dibawah Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda 1 Analis Kepemudaan 2 Penyuluh Kepemudaan
Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Pengadministrasi Umum Dibawah Kepala Seksi Tenaga Dan Organisasi Pemuda 1 Penyuluh Kepemudaan 2 Analis Kepemudaan 3 Pengadministrasi Umum 6 Dibawah Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda 1 Analis Kepemudaan 2 Pengelola Sarana Olahraga 3 Pengadministrasi Umum 7 Dibawah Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga 1 Analis Keolahragaan 2 Pengolah Data 3 Pengadministrasi Umum 8 Dibawah Kepala Seksi Kesejahteraan 1 Analis Kemitraan 2 Pengolah Data 3 Pengadministrasi Umum 9 Dibawah Kepala Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi Pengawas Keolahragaan 1 Pengelola Asrama 2 Pengadministrasi Umum 3 Pengolah Data 10 Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi 1 Pengolah Data 2 Analis Keolahragaan 3 Pengawas Keolahragaan 4 Penyuluh Keolahragaan



Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<p>11 Dibawah Kepala Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawas Keolahragaan 2 Analis Keolahragaan 3 Penyuluh Keolahragaan 4 Pengolah Data 5 Pengadministrasi Umum <p>12 Dibawah Kepala Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Analis Keolahragaan 2 Pengawas Keolahragaan 3 Penyuluh Keolahragaan 4 Pengadministrasi Umum <p>13 Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Analis Keolahragaan 2 Penyuluh Keolahragaan 3 Pengadministrasi Umum 4 Pengawas Keolahragaan <p>14 Dibawah Kepala Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawas Keolahragaan 2 Analis Keolahragaan 3 Pengadministrasi Umum

1.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2022

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Surat Inspektorat : Nomor 231/PW.02.02/Irban I Tanggal 19 September 2023 Hal : LHE AKIP pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>a. Perencanaan Dalam menyusun Dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi</p>	<p>a. Perencanaan -Dokumen perencanaan telah disusun dengan SMART, serta Cascading disetiap</p>



No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).</p> <p>b. Pengukuran Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/subbagian dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting); - Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja setiap Unit Kerja secara berjenjang; - Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan. <p>c. Pelaporan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reuiu terhadap dokumen Laporan Kinerja; - Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam penyajian informasi dalam Laporan Kinerja; - Memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada dokumen Laporan Kinerja; 	<p>level telah disusun dengan memperhatikan crosscutting. https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip/public-display/display-mikro/cascading</p> <p>b. Pengukuran Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/subbagian dan fungsi lain yang berkaitan(crosscutting) dipublikasikan melalui aplikasi Esakip https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip/ - Kinerja dilakukan melalui aplikasi Esakip https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip/ pada menu Raport Kinerja yang berisikan Data Laporan Kinerja triwulan I, II, III dan IV - Berupaya menjadikan pengukuran kinerja pada aplikasi Esakip sebagai dasar penempatan/penghapusan jabatan <p>c. Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reuiu penyusunan dokumen LKIP bersama Biro Organisasi - Berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam penyajian informasi dalam Laporan Kinerja - Melakukan reuiu arsitektur kinerja bersama Biro Organisasi

1.8 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan LKIP, Tugas Pokok dan Fungsi Dispora Provinsi Jawa Barat dan Core Bussiness yang terkait dengan sector Keolahragaan dan Kepemudaan serta bentuk sistematika penyajian.



Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang Renstra Dispora yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Uraian tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2016 dan Sasaran strategis dan indikator sasaran.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

Bab IV. Penutup

Menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Strategis, Kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran Strategis dan strategi pemecahan masalah.

Lampiran – lampiran

Berisi tentang format Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahunan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2018–2023 yaitu “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, yang selanjutnya diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :



1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Visi "Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", serta misi ke 2 (dua) yaitu " Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif " merupakan acuan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat untuk membangun urusan kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Barat. Untuk mewujudkan visi 2 (dua) dari Misi Kepala Daerah, Dispora menyusun tujuan dan sasaran beserta indikator yang terukur sebagai acuan dalam pencapaian Kinerja yang tersusun dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



Tabel. 2.1

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2018 – 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2023	2023	2023	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
I	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan		Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	45,33	46,67	46,67	46,67	46,67
1		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat	Poin	45,33	46,67	46,67	46,67	46,67
II	Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58
			Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat					
			a. PON		-	-	1	-	-
			b. PEPARPENAS		-	-	1	-	-
			c. POPNAS		1	-	1	-	1
			d. POPWILNAS			-	-	1	-
			e. PEPARPENAS		1	-	1	-	1
2		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58
			Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional	Peringkat					
			a. PEPARPENAS		1	-	1	-	1
3		Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat					
			a. POPNAS		1	-	1	-	1
			b. POPWILNAS		-	-	-	1	-
4		Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	persen	100	100	100	100	100



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dispora Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Selanjutnya, dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 menjadi hanya 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dispora Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dispora.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dispora Provinsi Jawa Barat adalah Indikator Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Kebahagiaan. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Kebahagiaan inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Dispora untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga IKU Kepala Dispora semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Kebahagiaan.

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.



Tabel. 2.2
Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat	Poin	46,67
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	58
		Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional		
		a. PEPARPENAS	Peringkat	3
3	Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional		
		a. POPNAS	Peringkat	1
		b. POPWILNAS	Peringkat	-

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dispora Provinsi Jawa Barat, maka disusun 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dispora yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Dispora Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Gubernur Jawa Barat. Program-program yang dikerjakan oleh Dispora Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :



Tabel. 2.3
Program dan Anggaran
Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 45,668,784,616	APBD Perubahan
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 18,074,701,600	APBD Perubahan
3.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 499,986,223,936	APBD Perubahan
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 7,095,000,000	APBD Perubahan
5.	Program Keolahragaan	Rp 3.968.375.000	APBN (Dekonsentrasi)



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Skala Penilaian :



Tabel 3.1
Skala Penilaian

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Perbandingan Realisasi Dengan Target Tahun 2023)

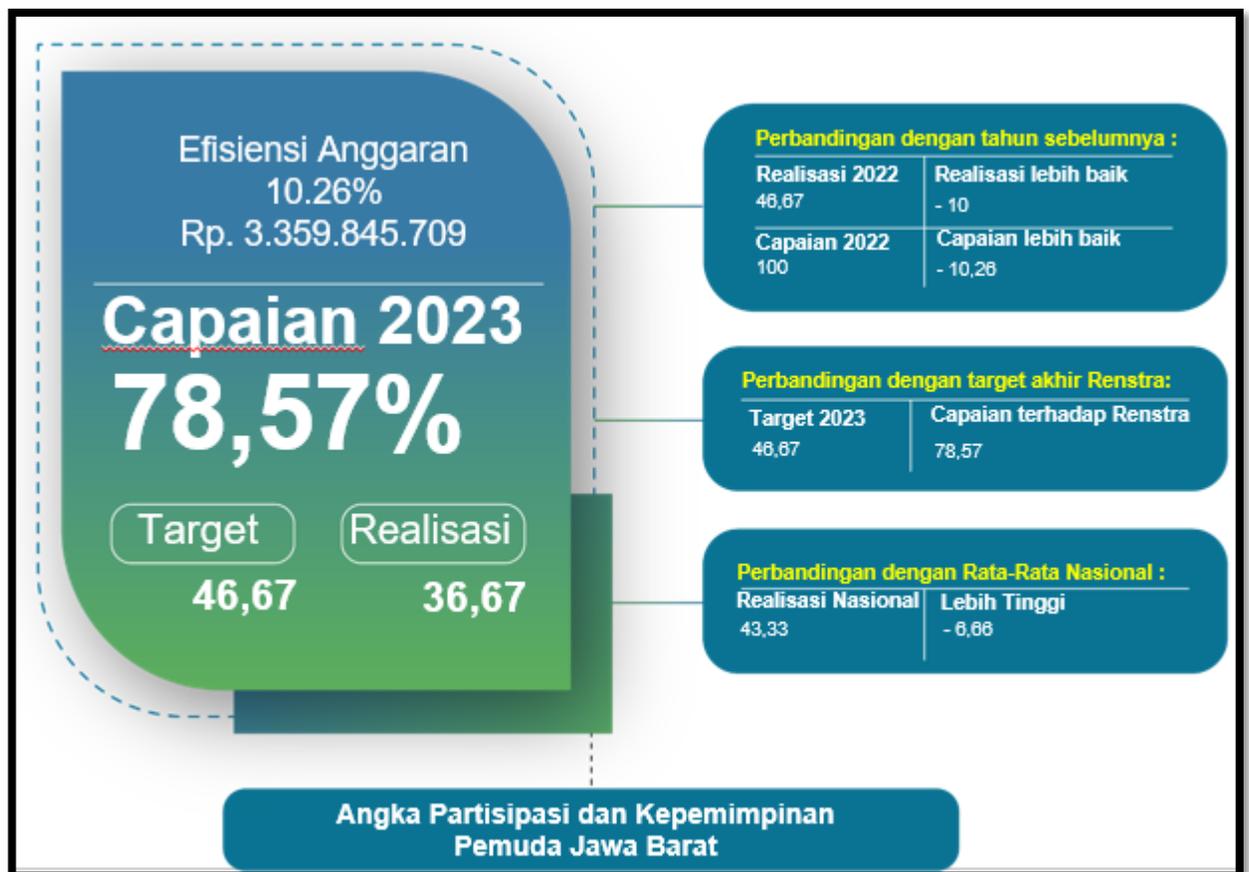
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan

Pengukuran Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda. Pengukuran ini dilakukan melalui Susunan MSBP yang dilakukan oleh BPS dan dilakukan penghitungan oleh Bappenas dan Kemenpora.



Gambar 3.1 Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda di Jawa Barat



Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat menunjukkan kondisi kurang baik. Kondisi ini mengindikasikan partisipasi dan kepemimpinan pemuda Jawa Barat mengalami penurunan. Adapun capaian angka partisipasi dan kepemimpinan pada tahun 2023 sebesar 78,57% dengan target yaitu 46,67% dan terealisasi 36,67%.

Dari segi realisasi angka partisipasi dan kepemimpinan Pemuda Jawa Barat mengalami penurunan realisasi sebesar 10% yaitu pada tahun 2022 sebesar 46,67% dan Tahun 2023 sebesar 36,67%. Apapun dari aspek capaian kinerja, angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda menurun sebesar 10,26% dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% dan capaian Tahun 2023 sebesar 78,57%.

Dalam perspektif perencanaan 5 (lima) tahunan indikator ini sudah sama dengan batas aman target akhir Renstra yaitu sebesar 46,67 dari target akhir Renstra sebesar 46,67.

Pada tingkat nasional angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda Jawa barat berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 6,66 dari rata rata nasional sebesar 43,33%.

Faktor keberhasilan Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan juga adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Organisasi ditandai Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan Sebesar 18 % hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang Organisasi yang dapat diukur dengan Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian sebesar 100 %. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya anggota marchindband untuk meningkatkan kemampuan anggota marching band sebanyak 112 Orang, Terlatihnya pemuda melalui pembinaan mental, spiritual dan ideologi sebanyak 120, Terlatihnya anggota organisasi kepemudaan mengenai manajemen organisasi kepemudaan sebanyak 420 Orang, Terlatihnya Pemuda melalui pengembangan kader, kepedulian dan kesukarelawanan sebanyak 210 Orang, Terbinanya organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan sebanyak 27 Organisasi, Terlatihnya anggota organisasi kepemudaan mengenai bahaya narkoba 260 Orang, Terbinanya pemuda dalam pengembangan kader provinsi untuk meningkatkan daya saing sebanyak 210 orang

Selain itu, factor keberhasilan Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Kewirausahaan yang ditandai dengan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri sebesar 8 %. Hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya kapasitas di bidang kewirausahaan yang dapat diukur dengan Persentase Pemuda yang dibina dibidang kewirausahaan sebesar 100 % . Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terlatihnya pemuda desa dalam pengembangan mental dan manajerial kewirausahaan sebanyak 700 orang, Terbinanya wirausaha muda melalui temu bisnis Wirausaha Pemuda Tingkat Pemula Sebanyak 100 Orang, Terlatihnya pemuda dalam pengembangan mental dan manajerial kewirausahaan sebanyak 180 orang, Terbinanya wirausaha muda melalui Lomba Wirausaha Muda Tingkat Jawa Barat sebanyak 45 Orang

factor keberhasilan Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Kepeloporan yang ditandai Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional sebesar 3,1 % . Hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya kapasitas di bidang kepeloporan yang dapat diukur dengan Persentase Pemuda yang dibina dibidang kepeloporan Sebesar 100 %. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya kreativitas pemuda melalui Terseleksinya



pemuda untuk pemuda pelopor tingkat nasional sebanyak 60 Orang, Terbinanya kepemimpinan pemuda melalui Jabar Innovationn Fellowship/JIF sebanyak 1000 orang, Terlatihnya Pemuda melalui pelatihan peningkatan karakter pemuda di era digital sebanyak 100 orang, Terlatihnya Pemuda melalui pelatihan kepemimpinan pemuda sebanyak 1000 orang, Terseleksinya pemuda untuk Pertukaran Pemuda antar Negara PPAN sebanyak 60 orang, Terseleksinya pemuda untuk Pertukaran Pemuda antar Provinsi sebanyak 60 orang, dan Terseleksinya pemuda untuk Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional sebanyak 1000 orang

factor keberhasilan Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan adalah Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam Kepramukaan yang ditandai Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepramukaan sebesar 100 %. Hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya kapasitas Pemuda dalam kepramukaan yang dapat diukur dengan Persentase Pemuda yang dibina dibidang dalam Organisasi Kepramukaan sebesar 100 %. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya anggota pramuka untuk meningkatkan kapasitas SDM Kepramukaan sebanyak 200 Orang, Terpantaunya kontingen jawa barat pada World Scout Jamboree sebanyak 513 orang, serta Terbinanya organisasi Kepramukaan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan sebanyak 27 Organisasi.

Meningkatnya angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda didukung oleh 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, serta 7 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi, Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi, Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi



Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar 10,26% atau setara dengan Rp. 3.026.071.144. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.759.116.890 dan terealisasi sebesar Rp.29.339.271.181.

Akar masalah tidak tercapainya Angka Partisipasi Kepemimpinan Pemuda dan Upaya memperbaikinya pada tahun 2024

Angka partisipasi kepemimpinan pemuda tidak mencapai target. Belum optimalnya peran pemuda di Jawa Barat disebabkan karena pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang belum optimal. Persentase sarana dan prasarana Pemuda termanfaatkan sebesar 79,17%. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik hanya mencapai 55%.

Sarana dan prasarana kepemudaan di Jawa Barat masih memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya kurang dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai tempat berkumpul dan berorganisasi. Kondisi ini telah berdampak pada penurunan angka partisipasi kepemimpinan pemuda di Jawa Barat. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai kondisi tersebut:

1. Kurangnya Fasilitas yang Memadai. Beberapa daerah di Jawa Barat masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para pemuda. Misalnya, kurangnya ruang pertemuan atau aula yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kepemudaan seperti diskusi, pelatihan, atau rapat organisasi.

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah Perbaikan dan Pembangunan Fasilitas. Perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan fasilitas kepemudaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan para pemuda, seperti ruang pertemuan, lapangan olahraga, atau pusat kegiatan seni dan budaya.

2. Kurangnya Aksesibilitas. Sarana dan prasarana kepemudaan. Sarana Prasarana kepemudaan yang tersedia sulit dijangkau oleh para pemuda karena lokasinya yang terpencil atau jauh dari tempat tinggal Kurangnya transportasi publik yang memadai juga dapat menjadi kendala dalam mencapai fasilitas tersebut.

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 Peningkatan Aksesibilitas Penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana kepemudaan mudah dijangkau oleh para



pemuda dengan menyediakan fasilitas di lokasi yang strategis dan memberikan aksesibilitas yang baik.

3. Kurangnya Promosi dan Informasi. Beberapa sarana dan prasarana kepemudaan mungkin belum cukup dikenal oleh para pemuda karena kurangnya promosi dan informasi yang efektif. Hal ini membuat para pemuda tidak menyadari adanya fasilitas tersebut atau tidak tahu cara mengaksesnya.

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 Promosi dan Informasi. Perlu dilakukan promosi yang intensif dan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang sarana dan prasarana kepemudaan yang tersedia di Jawa Barat.

4. Kondisi Fisik yang Kurang Memadai. Beberapa fasilitas kepemudaan mungkin memiliki kondisi fisik yang kurang memadai, seperti bangunan yang tua atau rusak, kurangnya fasilitas sanitasi yang layak, atau lingkungan sekitar yang kurang terawat. Hal ini dapat membuat para pemuda enggan atau merasa tidak nyaman untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah Melakukan perbaikan dan renovasi pada bangunan yang tua atau rusak agar menjadi lebih layak dan nyaman digunakan oleh para pemuda. Hal ini mencakup perbaikan struktur bangunan, pengecatan ulang, penggantian atap atau lantai yang rusak, serta perbaikan fasilitas lain yang diperlukan

5. Kurangnya Dukungan dan Pembinaan. kurangnya dukungan dan pembinaan dari pihak terkait seperti pemerintah daerah atau organisasi kepemudaan dapat membuat sarana dan prasarana kepemudaan tidak dioptimalkan untuk kegiatan pemuda.

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah Diperlukan dukungan dan pembinaan yang aktif dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan.

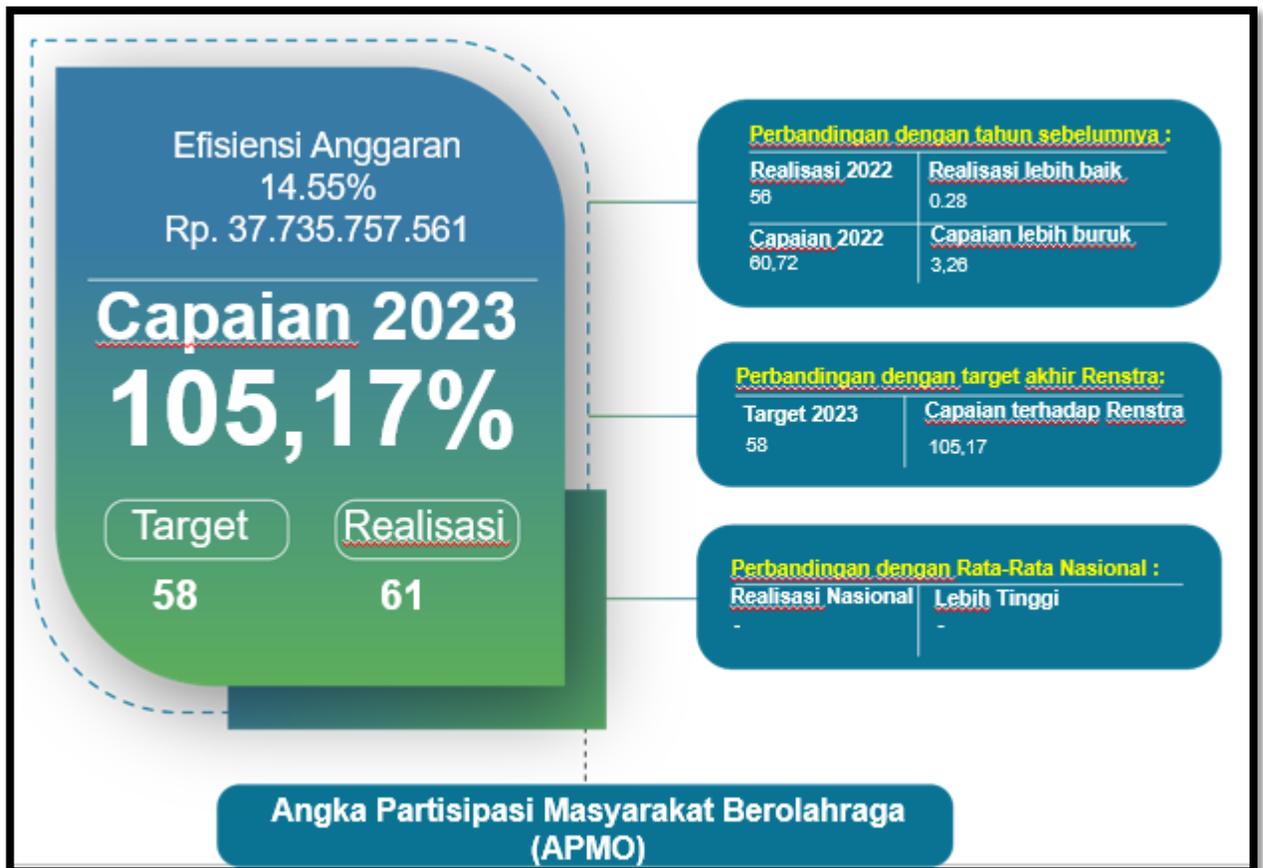
Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus diukur melalui Angka partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO). Pengukuran ini dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat melalui survey yang dilakukan oleh SP3OR di 104 Kecamatan di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat,



serta kelasmen akhir pada mutli even tingkat nasional Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas).

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)



Angka Pasrtisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)

Partisipasi masyarakat berolahraga menunjukkan kondisi yang baik, kondisi ini mengindikasikan keadaan masyarakat yang berolahraga memberikan daya dukung terhadap kesehatan masyarakat. Adapun Capaian Kinerja Angka Partisipasi Masyarakat berolahraga (APMO) pada tahun 2023 sangat baik dengan capaian sebesar 105,57% dari target sebesar 58% dan terealisasi sebesar 61%.

Dari aspek realisasi Angka Partisipasi Masyarakat berolahraga (APMO) mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya dengan realisasi tahun 2022 sebesar 60,72% dan realisasi Tahun 2023 sebesar 61%. Dari aspek capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 3,26% dengan capaian tahun 2022 sebear 108,43% dan Capaian Tahun 2023 sebesar 105,17%

Dalam perspektif perencanaan 5 (lima) tahunan indikator ini sudah melebihi batas aman target akhir Renstra yaitu sebesar 58% dengan target akhir Renstra 58%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Nasional karena hanya digunakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Faktor pendukung Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga. Aspek peningkatan masyarakat berolahraga yang ditandai dari persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga sebesar 10%. Hal tersebut

Faktor keberhasilan Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) adalah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam olahraga Rekreasi yang ditandai dengan Persentase Olahraga Rekreasi yang dibina sebesar 100 %. Hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya Event Olahraga rekreasi yang dapat diukur dengan Persentase Peningkatan olahraga rekreasi yang diselenggarakan Sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan asyarakat berpartisipasi pada FORNAS Tahun 2023 sebanyak 22.700 orang, Masyarakat berpartisipasi pada Lomba peringatan Haornas Tingkat Jawa Barat sebanyak 1500 orang. Dan Terbinanya organisasi untuk peningkatan angka parisipasi masyarakat berolahraga sebanyak 83 organisasi.

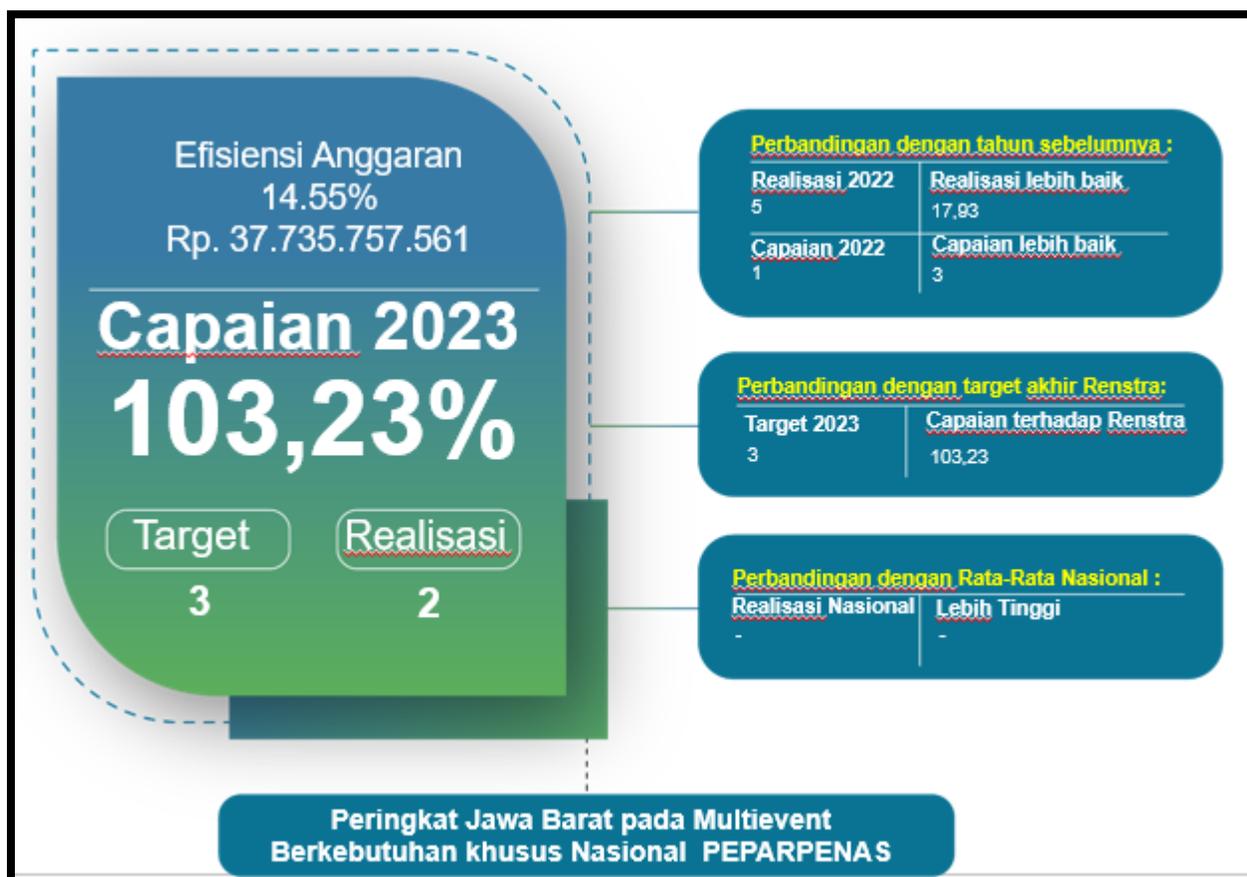
Faktor keberhasilan Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) adalah meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga yang ditandai dengan Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga sebesar 10%, hal tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya Kapasitas SP3OR dalam peningkatan masyarakat berolahraga yang dapat diukur dengan presentase SP3OR yang dibina dalam pengembangan peningkatan masyarakat berolahraga sebesar 100 %, Adapun upaya yang dilakukan Tersedianya data APMO sebanyak 12 Bulan, Terdistribusinya tenaga SP3OR kecamatan ke Kabupaten/Kota sebanyak 110 Orang, Terlatihnya tenaga SP3OR dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan olahraga masyarakat sebanyak 110 Orang

Meningkatnya angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) didukung oleh 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, serta 3 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus, dan Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.



Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar 14,55% atau setara dengan Rp. 37.735.428. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 259.393.994.989 dan terealisasi sebesar Rp. 221.658.237.428.

Gambar 3.3 Peringkat Jawa Barat pada Multieven Berkebutuhan khusus Nasional PEPARPENAS



Peringkat Jawa Barat pada Multieven Berkebutuhan khusus Nasional PEPARPENAS

Meningkatnya prestasi pada multieven berkebutuhan khusus nasional PEPARPENAS menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan prestasi olahraga berkebutuhan khusus di Jawa Barat meningkat. Adapun Capaian Kinerja Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional PEPARPENAS tercapai sebesar 103,32% dengan target Tahun 2023 yaitu peringkat ke 3 dan realisasi peringkat ke 2.

Dari aspek realisasi, Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional PEPARPENAS mengalami peningkatan realisasi sebesar 17,93% dari tahun sebelumnya dengan realisasi tahun 2022 peringkat ke 5 dan realisasi Tahun 2023 peringkat 2. Dari aspek capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 17,93% dengan capaian tahun 2022 sebesar 85,29% dan Capaian Tahun 2023 sebesar 103,23%



Dalam perspektif perencanaan 5 (lima) tahunan indikator ini sudah melebihi batas aman target akhir Renstra yaitu peringkat ke 3 dengan target akhir Renstra peringkat ke 3. Indikator ini menempatkan provinsi Jawa Barat pada Multievent nasional berkebutuhan khusus PEPARPENAS pada peringkat ke 2.

Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus dipengaruhi oleh Meningkatnya Prestasi atlet Olahraga Berkebutuhan Khusus. Aspek Meningkatnya Prestasi atlet Olahraga Berkebutuhan Khusus diperlihatkan dari Presentase medali emas yang diperoleh dalam event nasional Peparpenas sebesar 13,91%. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya Kapasitas atlet berkebutuhan khusus yang dapat diukur dengan Presentase atlet berkebutuhan Khusus yang dibina sebesar 100 %. Adapun upaya yang dilakukan Ikutsertanya atlet pelajar Jawa Barat dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) sebanyak 6 Cabor, Terseleksinya bibit atlet Jawa Barat melalui Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) sebanyak 12 Cabor

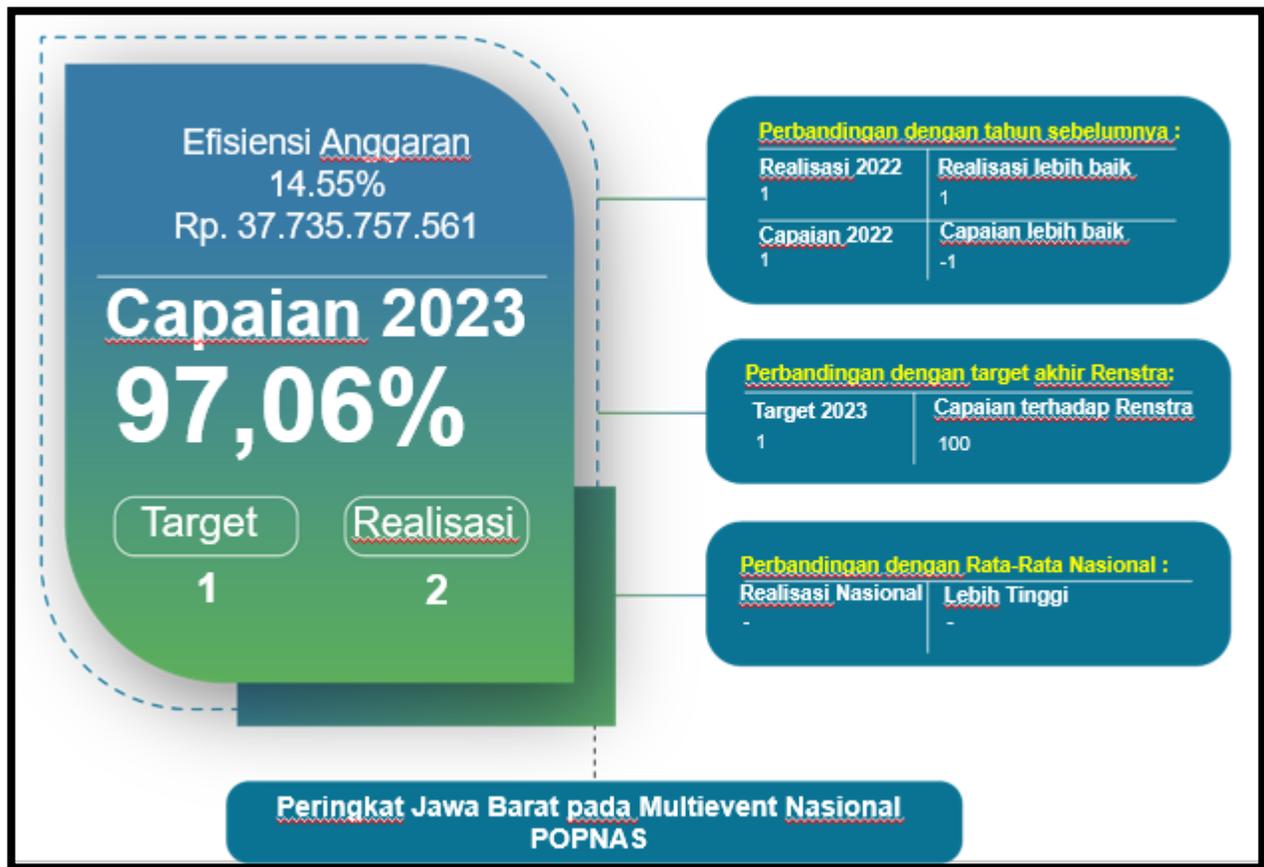
Meningkatnya prestasi pada multievent berkebutuhan khusus nasional PEPARPENAS didukung oleh 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, serta 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi, Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar 14,55% atau setara dengan Rp. 37.735.428. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 259.393.994.989 dan terealisasi sebesar Rp. 221.658.237.428.



Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

Pengukuran Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional. Pengukuran ini dilakukan melalui kelasmen akhir pada mutli even tingkat nasional Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (POPNAS).

Gambar 3.4 Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional (POPNAS)



Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional (POPNAS)

Meningkatnya prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional menunjukkan kondisi yang kurang baik, kondisi ini mengindikasikan terjadinya penurunan prestasi olahraga Jawa Barat. Adapun Capaian Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS tercapai sebesar 97,06% dengan target Tahun 2023 yaitu peringkat ke 1 dan terealisasi peringkat ke 2.

Dari Aspek Realisasi, Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS mengalami penurunan realisasi sebesar 1 peringkat dari tahun sebelumnya dengan realisasi tahun 2022 peringkat ke 1 dan realisasi Tahun 2023 peringkat ke 2. Dari aspek capaian mengalami penurunan sebesar 2,94% dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% dan Capaian Tahun 2023 sebesar 97,06%.

Dalam perspektif perencanaan 5 (lima) tahunan indikator ini sudah sama dengan batas aman target akhir Renstra yaitu peringkat ke 1 dengan target akhir Renstra

peringkat ke 1. Indikator Indikator menempatkan provinsi Jawa Barat pada Multievent nasional POPNAS pada peringkat ke 2.

Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS dipengaruhi oleh Meningkatnya Kualitas Atlet. Aspek Meningkatnya Kualitas Atlet diperlihatkan dari Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPNAS sebesar 15%. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kualitas pembinaan Kualitas Atlet yang dapat diukur dengan Persentase atlet yang dibina dalam meraih medali sebesar 15 %. Adapun upaya yang dilakukan Ikutsertanya atlet pelajar Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) sebanyak 320 Orang, Ikutsertanya atlet pelajar se-Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sebanyak 23 Cabor,, Terseleksinya atlet pelajar untuk Pusat Pendidikan dan Latihan Atlet Pelajar (PPLP) sebanyak 154 Orang, Ikutsertanya atlet pelajar Jawa Barat dalam uji tanding atlet PPLP sebanyak 6 cabor, Terseleksinya atlet pelajar untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) sebanyak 165 orang, Terbinanya atlet PPLP dalam peningkatan prestasi olahraga pelajar Jawa Barat sebanyak 154 Orang, Terbinanya atlet pelajar se-Jawa Barat melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sebanyak 23 Cabor, Ikutsertanya atlet pelajar Jawa Barat dalam Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event sebanyak 500 Orang, Ikutsertanya atlet pelajar Jawa Barat dalam Kejurnas PPLP Sebanyak sebanyak 5 Cabor,

Meningkatnya prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional didukung oleh 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, 3 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, serta 5 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi , Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi dan Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.



Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar 14,55% atau setara dengan Rp. 37.735.428. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 259.393.994.989 dan terealisasi sebesar Rp. 221.658.237.428.

Akar masalah tidak tercapainya Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS dan upaya memperbaikinya di Tahun 2024

Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional tidak tercapai. Belum optimalnya para atlet Jawa barat untuk meningkatkan peringkat kontingen Jawa Barat pada POPNAS Tahun 2023 disebabkan karena belum optimalnya Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPNAS sebesar 15 %, selain itu kondisi Persentase Atlet yang dibina dalam meraih medali sebesar 15 %. Faktor kegagalan atlet Jawa Barat dalam meraih medali dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan atlet. Tanpa adanya anggaran yang cukup untuk pengembangan infrastruktur olahraga, pelatihan, dan kompetisi, atlet Jawa Barat mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai performa terbaik mereka.

Selain itu, kurangnya program pelatihan yang terstruktur dan berkualitas juga dapat menjadi faktor penting. Atlet yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal teknik, strategi, kondisi fisik, dan mental cenderung menghadapi kesulitan dalam bersaing di level yang lebih tinggi, Kondisi ini telah berdampak pada penurunan Raihan medali atlet Jawa Barat dalam Multievent Nasional Popnas. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai kondisi tersebut

1. Kurangnya Persiapan Fisik yang Optimal, Beberapa atlet mungkin tidak mencapai kondisi fisik puncak karena kurangnya waktu latihan yang intensif dan terfokus sebelum bertanding

Upaya yang dilakukan Tahun 2024 Meningkatkan intensitas dan kualitas latihan fisik atlet, termasuk melalui program pelatihan yang lebih terstruktur dan intensif

2. Infrastruktur Olahraga yang Kurang Memadai, Kurangnya fasilitas dan infrastruktur olahraga yang berkualitas dapat menghambat persiapan dan performa atlet.

Upaya yang dilakukan Tahun 2024 Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur olahraga, seperti memperbaiki lapangan dan menyediakan fasilitas latihan yang lebih baik.



3. Kekurangan Pembinaan Mental dan Strategi, Beberapa atlet mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola tekanan mental dan menerapkan strategi kompetitif yang efektif.

Upaya yang dilakukan Tahun 2024 Mengadakan pelatihan mental yang lebih intensif, memberikan dukungan psikologis, dan merancang strategi kompetitif yang lebih baik bersama tim pelatih.

Capaian kinerja akumulasi dari ke-4 sasaran strategis diatas sebesar 101,83% dengan rincian sebagai berikut :

$(105,17 + 103,23 + 78,57 + 97,06) / 4 = 96$ (Sangat Baik)

Faktor- faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian strategis diatas dapat dilihat dari pencapaian program sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dispora Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023

No	Sasarn Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya prestasi pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di bidang kewirausahaan, Organisasi dan Kepeloporan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaann dan organisasi kemasyarakatan	Persen	18	18	100,00	Sangat Baik
		Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dalam kondisi baik	Persen	72	57	79,17	Baik
		Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3	3,1	103,33	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	8	8	100,00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPNAS	Persen	20	15	75,00	Baik
		Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPWILNAS	Persen	0	0		
		Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	87	55	63,22	Baik



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Keterangan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	100,00	Sangat Baik
		Presentase medali emas yang diperoleh dalam event nasional Peparpenas	Persen	12	13,91	115,92	Sangat Baik
4	Meningkatnya Perisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Kepramukaan	Persen	17	17	100,00	Sangat Baik

3.2 Realisasi Anggaran

Dispora dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 37 sub kegiatan, 10 kegiatan yang tercakup dalam 4 program yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 9 (sembilan) indikator Program sebagaimana tercantum dalam Renstra Dispora Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018 – 2023. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke 9 (sembilan) indikator Dispora Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 258.536.404.705,- dari total anggaran Dispora Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 296.818.254.960,-, sisnya sebesar Rp. 38.281.850.255,- sebagai penunjang urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Berikut disampaikan tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Program pada Tahun 2023 yaitu :



Tabel 3.3

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Pagu Anggaran	Capaian (%)
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp 333.922.265.589	Rp 325.584.208.139	Rp 8.338.057.450	97,503
2.19.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 41.769.153.710	Rp 41.420.801.098	Rp 348.352.612	99,166
	1.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.135.504.567	Rp 1.114.411.664	Rp 21.092.903	98,142
	01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 696.971.507	Rp 689.027.529	Rp 7.943.978	98,860
	06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 438.533.060	Rp 425.384.135	Rp 13.148.925	97,002
	1.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 24.093.961.048	Rp 23.886.667.683	Rp 207.293.365	99,140
	01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 23.973.961.048	Rp 23.766.756.645	Rp 207.204.403	99,136
	07	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 120.000.000	Rp 119.911.038	Rp 88.962	99,926
	1.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 20.750.000	Rp 18.480.000	Rp 2.270.000	89,060
	09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.750.000	Rp 18.480.000	Rp 2.270.000	89,060
	1.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.260.809.726	Rp 3.226.806.222	Rp 34.003.504	98,957
	01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 308.199.598	Rp 306.344.045	Rp 1.855.553	99,398
	02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.077.917.600	Rp 1.063.694.150	Rp 14.223.450	98,680
	05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 343.200.000	Rp 330.862.202	Rp 12.337.798	96,405
	08	4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 717.485.740	Rp 713.610.650	Rp 3.875.090	99,460
	09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 814.006.788	Rp 812.295.175	Rp 1.711.613	99,790
	1.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 8.871.584.850	Rp 8.830.657.387	Rp 40.927.463	99,539
	01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.004.000	Rp 25.000.000	Rp 4.000	99,984
	02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.822.824.212	Rp 1.803.074.758	Rp 19.749.454	98,917
	04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 7.023.756.638	Rp 7.002.582.629	Rp 21.174.009	99,699
	1.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.386.543.519	Rp 4.343.778.142	Rp 42.765.377	99,025
	01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 46.600.000	Rp 41.026.580	Rp 5.573.420	88,040
	02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp 816.251.307	Rp 811.534.721	Rp 4.716.586	99,422



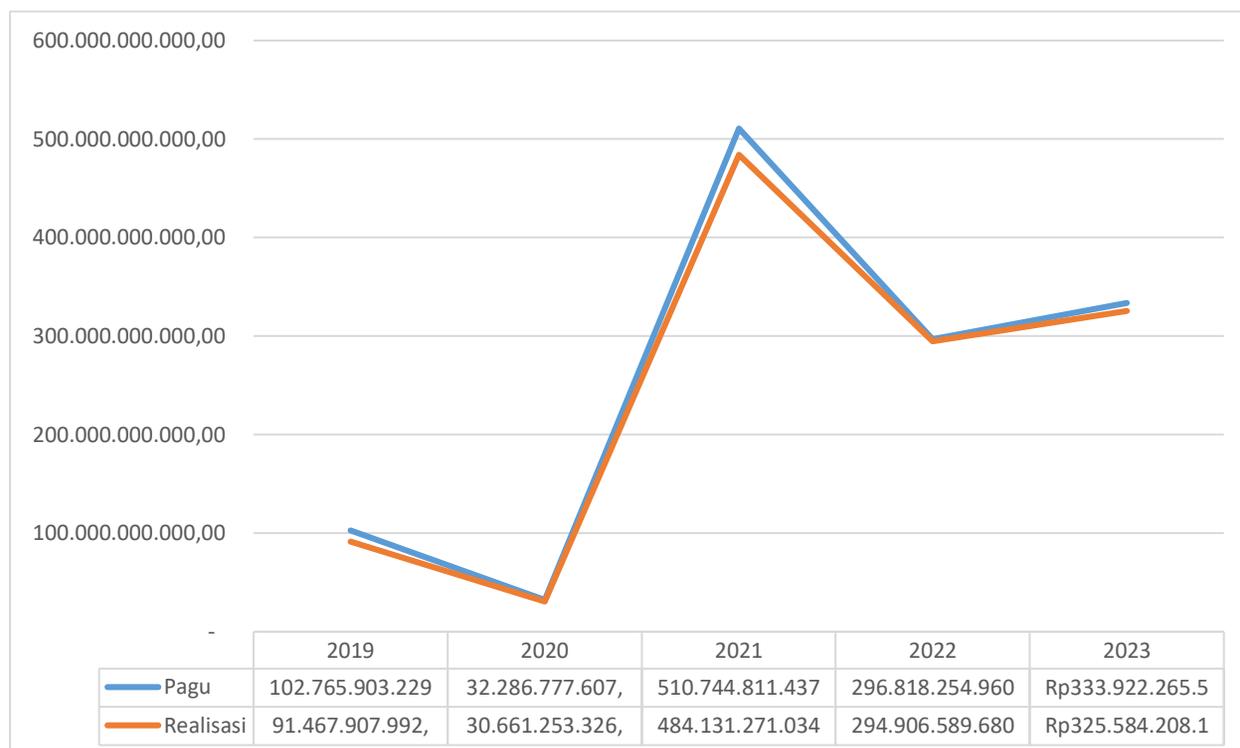
Kode Rekening	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Pagu Anggaran	Capaian (%)
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	07		3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 309.640.500	Rp 308.880.500	Rp 760.000	99,755
	09		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.001.057.290	Rp 993.040.754	Rp 8.016.536	99,199
	10		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.212.994.422	Rp 2.189.295.587	Rp 23.698.835	98,929
2.19.02		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 25.218.616.890	Rp 23.921.425.195	Rp 1.297.191.695	94,856
	1.01	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Rp 14.961.736.115	Rp 14.069.235.770	Rp 892.500.345	94,035
	01		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Rp 4.849.189.410	Rp 4.642.279.756	Rp 206.909.654	95,733
	02		2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Rp 5.486.058.800	Rp 5.425.641.868	Rp 60.416.932	98,899
	03		3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Rp 3.597.951.605	Rp 3.570.520.424	Rp 27.431.181	99,238
	04		4 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Rp 402.801.800	Rp 232.475.722	Rp 170.326.078	57,715
			5 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Rp 492.354.500	Rp 65.238.000	Rp 427.116.500	13,250
	06		6 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Rp 133.380.000	Rp 133.080.000	Rp 300.000	99,775
	1.02	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 10.256.880.775	Rp 10.071.905.225	Rp 184.975.550	98,197
	02		1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Rp 10.256.880.775	Rp 10.071.905.225	Rp 184.975.550	98,197
2.19.03		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 259.393.994.989	Rp 253.040.872.351	Rp 6.353.122.638	97,551
	1.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 12.616.696.514	Rp 11.875.733.355	Rp 740.963.159	94,127
	01		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Rp 6.689.618.747	Rp 6.308.744.312	Rp 380.874.435	94,306
	02		2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Rp 2.162.096.268	Rp 1.942.792.035	Rp 219.304.233	89,857



Kode Rekening	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Pagu Anggaran	Capaian (%)
	03	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Rp 3.764.981.499	Rp 3.624.197.008	Rp 140.784.491	96,261
	1.02	2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Rp 60.320.271.188	Rp 57.032.274.612	Rp 3.287.996.576	94,549
	01	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Rp 11.405.052.988	Rp 9.848.046.221	Rp 1.557.006.767	86,348
	02	2 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Rp 38.288.736.000	Rp 37.459.055.858	Rp 829.680.142	97,833
	03	3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Rp 10.626.482.200	Rp 9.725.172.533	Rp 901.309.667	91,518
	1.03	3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Rp 90.489.576.087	Rp 88.839.921.779	Rp 1.649.654.308	98,177
	02	1 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp 5.561.489.903	Rp 5.356.029.080	Rp 205.460.823	96,306
		2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Rp 6.510.490.820	Rp 6.329.325.600	Rp 181.165.220	97,217
			Rp 42.150.458.391	Rp 41.050.023.669	Rp 1.100.434.722	97,389
	05	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Rp 36.267.136.973	Rp 36.104.543.430	Rp 162.593.543	99,552
	1.04	4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 95.967.451.200	Rp 95.292.942.605	Rp 674.508.595	99,297
	02	1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 95.967.451.200	Rp 95.292.942.605	Rp 674.508.595	99,297
2.19.04		4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 7.540.500.000	Rp 7.201.109.495	Rp 339.390.505	95,499
	1.01	1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp 7.240.500.000	Rp 7.201.109.495	Rp 39.390.505	99,456
	02	1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Rp 7.540.500.000	Rp 6.989.749.560	Rp 550.750.440	92,696
		2 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Rp 300.000.000	Rp 211.359.935	Rp 88.640.065	70,453
			Rp 333.922.265.589	Rp 325.584.208.139	Rp 8.338.057.450	97,503



**Gambar 3.2 Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan
Dispora Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**



BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 yang dituangkan menjadi 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama Kepala Dispora. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dispora Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Dispora Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2018-2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori sangat Baik Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 96%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari



telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dispora Provinsi Jawa Barat yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dispora Provinsi Jawa Barat antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya Performance Management System/PMS) di lingkungan Dispora Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dispora mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Dispora Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Dispora yang telah ditetapkan, ada 1 (satu) indikator yaitu Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda yang menggunakan realisasi tahun 2022, karena rilis data yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas pada bulan Oktober 2023, dan 2 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu Angka Partisipasi dan Kemeimpinan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 78,57% dan Peingkat Jawa Barat pada Multievent Nasional (POPNAS) dengan Realisasi sebesar 97,06%.

Hasil analisis dalam kegagalan pencapaian target untuk indikator tersebut adalah bahwa indikator tersebut harus mendapat perhatian khusus dan mendapat intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat serta Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Daerah Jawa Barat untuk meningkatkan masyarakat berolahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui program strategis yang akan dilaksanakan.



B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dispora Provinsi Jawa Barat, antara lain :

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dispora Provinsi Jawa Barat;

Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dispora Provinsi Jawa Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.



Lampiran :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASEP SUKMANA, M. SI.

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BEY TRIADI MACHMUDIN

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Barat

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 November 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


Ditandatangani secara elektronik oleh :
PJ. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN


Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.SI.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://nrt Jabar.jabarprov.go.id/v0312023A23>



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	46,67 Point
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	61 %
		Peringkat Jabar pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional	Peringkat 3
3.	Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS	Peringkat 1

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 41.769.153.710	APBD
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 25.216.616.690	APBD
3.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 259.393.994.989	APBD
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 7.540.500.000	APBD
5.	Program Keolahragaan	Rp 5.316.000.000	APBN

Bandung, 14 November 2023


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
RJ. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PROVINSI JAWA BARAT**

Dr. ASEP SUKMANA, M.Si.
 Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses laman berikut <https://stbaha.jabarpro.go.id/v/1312023423>

Lampiran :

DATA CAPAIAN KINERJA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Sasaran, Nomor, Jumlah Data	F1			F2			F3			F4			F5			F6					F7							
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Peringkat/Perencanaan Capaian 2023	Peringkat/Perencanaan Realisasi 2023	Target 2023 (R1/R2/R3)	Realisasi 2023 (R1/R2/R3)	Realisasi 2023 (R1/R2/R3)	Perbandingan Realisasi 2023 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level (Nasional)	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Nama Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Salah Anggaran	Capaian	Salah			
<p>INDIKATOR 21 Meningkatkan peran Pemadatan Pembangunan</p>																														
1	Angka Partisipasi dan Keterampilan Pemuda Jawa Barat	Indikator Sasaran: Rata-rata Nasional (RPN) Data Cara peningkatan: Melalui Program SDG4, strategi Edukasi, nasional dan provinsi, dengan mengintegrasikan: 1. Pemertanian Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial dan Komunitas 2. Pemertanian Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial dan Komunitas 3. Pemertanian Pemuda yang Mendukung Inovasi/Pengembangan dalam negeri	80,67	80,67	78,17	80,67	80,67	300,00	-1,00	-10,00	80,67	78,17	81,00	-0,80	20	0	Meningkatkan Pemuda Pemertanian Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Ekspansi	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan keorganisasian dan organisasi kemasyarakatan	80	80	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS CAHAYA BERKUALITAS	Rp	20.270.074.000	Rp	23.740.041.700	Rp	0.030.071.144	88,00	12,00
			Meningkatkan pemertanian pemuda dan pemertanian Pemuda	80	80	81,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS CAHAYA BERKUALITAS																							
			Meningkatkan Pemuda Pemertanian Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Ekspansi	0	0,1	101,00																								
			Meningkatkan Pemuda Pemertanian Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Ekspansi	0	0	100																								
Meningkatkan Pemuda Pemertanian Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Ekspansi	0	0	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS CAHAYA BERKUALITAS	Rp	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00																			
<p>Realisasi: 20.270.074.000 20.270.074.000 0.030.071.144 88,00 12,00</p> <p>Revisi/kelebihan: -</p>																														
<p>INDIKATOR 22 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berkeadilan dan Peran/Kelembagaan Berkeadilan Utama</p>																														
2	Angka Partisipasi Masyarakat Berkeadilan (APMB)	Indikator Sasaran: Rata-rata Nasional dan Challenge Provinsi Jawa Barat melalui SPMB (Sasaran Pembangunan Masyarakat Berkeadilan)	98	91	100,00	98,00	98,00	300,00	-1,00	0,00	98	100,00	0	0	0	0	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berkeadilan	1. Pemertanian Partisipasi Partisipasi Masyarakat Berkeadilan	80	80	100	PROGRAM PENGEMBANGAN CAHAYA BERKUALITAS	Rp	200.000.000.000	Rp	221.000.237.420	Rp	37.700.707.000	88,00	10,00
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berkeadilan Utama	80	80	111,00	111,00																							
<p>Realisasi: 200.000.000.000 221.000.237.420 37.700.707.000 88,00 10,00</p> <p>Revisi/kelebihan: -</p>																														
<p>INDIKATOR 23 Meningkatkan peran Pemuda Muda dan Pemuda Nasional</p>																														
1	Partisipasi Pemuda Muda dan Pemuda Nasional (PPMNS)	Indikator Sasaran: Pemuda atau PPMNS	0	0	100,00	1,00	1,00	300,00	-1,00	1,00	1	100,00	0	0	2	2	Meningkatkan Pemuda Muda dan Pemuda Nasional	1. Pemertanian pemuda muda yang mengikuti kegiatan keorganisasian dan organisasi kemasyarakatan	80	80	100	PROGRAM PENGEMBANGAN CAHAYA BERKUALITAS	Rp	200.000.000.000	Rp	221.000.237.420	Rp	37.700.707.000	88,00	10,00
			Meningkatkan Pemuda Pemuda dan Pemuda Nasional	80	80	100																								
<p>Realisasi: 200.000.000.000 221.000.237.420 37.700.707.000 88,00 10,00</p> <p>Revisi/kelebihan: -</p>																														
<p>INDIKATOR 24 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Pemuda Nasional</p>																														
1	Kualitas Pemuda dan Pemuda Nasional (KPPNS)	Indikator Sasaran: Rata-rata Nasional dan Challenge Provinsi Jawa Barat melalui SPMB (Sasaran Pembangunan Masyarakat Berkeadilan)	0	0	100,00	1,00	1,00	300,00	-1,00	1,00	1	100,00	0	0	2	2	Meningkatkan Pemuda dan Pemuda Nasional	1. Pemertanian pemuda muda yang mengikuti kegiatan keorganisasian dan organisasi kemasyarakatan	80	80	100	PROGRAM PENGEMBANGAN CAHAYA BERKUALITAS	Rp	41.700.000.000	Rp	41.000.000.000	Rp	100,00	0,00	
			Meningkatkan Pemuda Pemuda dan Pemuda Nasional	80	80	100																								
			Meningkatkan Pemuda Pemuda dan Pemuda Nasional	80	80	100																								
<p>Realisasi: 41.700.000.000 41.000.000.000 100,00 0,00</p> <p>Revisi/kelebihan: -</p>																														



